



DINAMIKA PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI DAN RESPON POLITIK DI DESA BAKUNG : STUDI KASUS PT CIPTA MANDALA LUMBER NUSANTARA

M. Wisnu Syailendra¹ Ainur Ropik² Dumyati³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

wisnussyailendra12@gmail.com¹ ainurropik_uin@radenfatah.ac.id²

azza.dum@gmail.com³

Abstract (English)

The wood-processing industry plays a strategic role in Indonesia's national economy, yet its operations often create significant environmental impacts on surrounding communities. This study aims to analyze the dynamics of industrial waste management and the political responses arising from the environmental impacts caused by PT Cipta Mandala Lumber Nusantara in Bakung Village, Ogan Ilir Regency. Using a descriptive qualitative method, data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed to identify patterns of conflict and mitigation measures. The findings reveal that waste management in the early years was suboptimal, leading to public complaints regarding black dust pollution, health disturbances, and environmental concerns. These issues triggered collective community actions demanding transparency and accountability from the company. This situation created local political dynamics involving village authorities, the company, and the Environmental Agency. Improvement efforts—such as installing boilers, air filters, taller chimneys, and conducting regular monitoring—successfully reduced environmental disturbances and gradually improved community perceptions. This research demonstrates that industrial waste issues are not only ecological but also political, requiring continuous collaboration among communities, authorities, and industries to achieve environmental justice.

Article History

Submitted: 3 Oktober 2025

Accepted: 6 Oktober 2025

Published: 7 Oktober 2025

Key Words

industrial waste, environmental politics, community conflict, wood industry, Bakung Village.

Abstrak (Indonesia)

Industri pengolahan kayu memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, namun aktivitas produksi sering kali menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pengelolaan limbah industri dan respons politik yang muncul akibat dampak pencemaran yang dihasilkan oleh PT Cipta Mandala Lumber Nusantara di Desa Bakung, Kabupaten Ogan Ilir. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dihimpun melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola konflik dan upaya penanganannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan limbah pada tahap awal belum optimal, sehingga menimbulkan keluhan masyarakat berupa debu hitam, gangguan kesehatan, dan keresahan lingkungan. Respons masyarakat kemudian berkembang menjadi aksi kolektif yang menuntut transparansi serta tanggung jawab perusahaan. Kondisi ini memunculkan dinamika politik lokal yang melibatkan pemerintah desa, perusahaan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Upaya perbaikan seperti pemasangan boiler, penyaring udara, peninggian cerobong, serta pemantauan berkala berhasil mengurangi gangguan lingkungan dan mengubah persepsi masyarakat menjadi lebih positif. Penelitian ini menegaskan bahwa persoalan limbah industri tidak hanya berdimensi ekologis, tetapi juga politis, sehingga memerlukan kolaborasi

Sejarah Artikel

Submitted: 3 Oktober 2025

Accepted: 6 Oktober 2025

Published: 7 Oktober 2025

Kata Kunci

limbah industri, politik lingkungan, konflik masyarakat, industri kayu, Desa Bakung.



berkelanjutan antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan demi terwujudnya keadilan lingkungan.

PENDAHULUAN

Pabrik pengolahan kayu di Indonesia memegang peranan besar dalam memanfaatkan kekayaan hutan nasional. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan produksi kayu terbesar di dunia, sehingga industri ini tidak hanya memberi nilai tambah melalui proses pengolahan, tetapi juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang menggantungkan hidup pada sektor kehutanan. Beragam produk olahan seperti kayu lapis, furnitur, hingga material bangunan mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun ekspor, seiring dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur dan perumahan. Namun, perkembangan industri kayu tetap dibayangi isu keberlanjutan, mulai dari deforestasi, praktik penebangan tanpa kontrol, hingga dampak lingkungan dari proses produksi. Karena itu, pelaku industri perlu menerapkan prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan agar manfaat ekonominya tetap sejalan dengan kepentingan sosial dan ekologi.

Sektor kayu merupakan salah satu bidang industri penting di Indonesia, dengan berbagai jenis produk seperti kayu bulat, kayu gergajian, dan kayu lapis. Kayu lapis atau triplek merupakan material hasil pabrikan yang dibuat dari beberapa lapisan venir kayu yang direkatkan menjadi satu. Produk ini cukup fleksibel, ekonomis, mudah dibentuk, serta proses produksinya tidak rumit. Industri kayu lapis berkembang pesat pada periode 1980–1997 setelah pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri pada Mei 1980 tentang penyediaan kayu domestik yang diikuti kebijakan pelarangan ekspor kayu gelondongan. Kebijakan lanjutan berupa Surat Keputusan Bersama Empat Menteri pada April 1981 semakin mendorong pertumbuhan industri kayu lapis secara signifikan (Map Road Revitalisasi Industri Kehutanan, Departemen Kehutanan, 2007).

Industri pengolahan kayu pun menjadi sektor strategis yang menopang ekonomi nasional karena Indonesia memiliki sumber daya hutan tropis dengan kualitas kayu yang tinggi. Pada 2 Maret 2025, tercatat 128 perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO) dan beroperasi di berbagai wilayah seperti Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan. Data Badan Pusat Statistik tahun 2023 mencatat volume produksi kayu mencapai 68.215.724,45 m³, menunjukkan besarnya potensi industri ini dalam memenuhi permintaan pasar domestik maupun internasional. Di tingkat daerah, produksi kayu bulat di Kabupaten Ogan Ilir pada 2022 mencapai 10.747.393,00 m³, kayu gergajian 45.350,00 m³, dan kayu lapis 14.735,00 m³. Tingginya angka produksi ini membawa konsekuensi ekologis, terutama karena limbah industri kayu—baik padat, cair, maupun gas—berpotensi mencemari lingkungan bila tidak dikelola dengan benar. Tanah, air, dan udara bisa terkontaminasi, kemudian menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat.

Di Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Ogan Ilir, industri penggergajian kayu seperti PT Cipta Mandala Lumber Nusantara (CMLN) memberi kontribusi ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja. Namun, perkembangan ini diikuti meningkatnya persoalan lingkungan, terutama terkait pengelolaan limbah. Dampak pencemaran kemudian berkembang menjadi isu politik karena melibatkan masyarakat, pemerintah desa, dan instansi pengawas lingkungan. Pada Juli 2023, ratusan warga Desa Bakung menggelar aksi demonstrasi di kantor Bupati Ogan Ilir untuk meminta pencabutan izin operasional PT CMLN. Warga menilai perusahaan telah



menyebabkan pencemaran berupa debu hitam yang mencemari lingkungan, khususnya di Dusun 3. Mereka juga menuntut Dinas Lingkungan Hidup melakukan investigasi atas dugaan pencemaran tersebut. Selama tiga tahun, masyarakat mengaku terus terpapar debu tanpa ada respons berarti dari pihak perusahaan. Upaya mediasi juga tidak membuahkan hasil karena keluhan warga tidak ditanggapi. Pemerintah desa pun dinilai pasif karena belum menunjukkan langkah tegas dalam menindaklanjuti aspirasi tersebut.

Kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa pengelolaan limbah oleh PT Cipta Mandala Lumber Nusantara belum optimal dan telah memengaruhi kualitas hidup masyarakat Desa Bakung. Keluhan seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan—mulai dari sesak napas hingga penyakit kulit—serta menurunnya kualitas sumber daya alam menjadi indikator nyata dampak aktivitas industri. Situasi ini menuntut respons kebijakan yang tegas dari pemerintah desa, peran aktif masyarakat, serta langkah investigatif dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan lingkungan. Jika ditemukan pelanggaran, masyarakat menuntut agar izin operasi perusahaan dicabut mengingat masalah ini telah berlangsung selama tiga tahun tanpa penyelesaian. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana dinamika pengelolaan limbah industri dan respons politik yang muncul dalam kasus PT Cipta Mandala Lumber Nusantara di Desa Bakung.

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan dan manfaat penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena secara mendalam melalui kata-kata atau kalimat yang bersumber dari perilaku, tindakan, serta pernyataan para informan. Pendekatan kualitatif bersifat holistik, sehingga individu maupun kelompok tidak dipisahkan ke dalam variabel atau hipotesis tertentu, melainkan dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh sebagaimana diungkapkan Bogdan dan Taylor (1975:5).

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari para informan yang terdampak oleh keberadaan limbah debu hitam, terutama masyarakat Desa Bakung yang merasakan pengaruh pencemaran tersebut serta pemerintah lokal yang terlibat dalam proses penanganannya. Sementara itu, data sekunder diambil dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, arsip, berita, dan sumber lain yang relevan guna memperkuat dan memvalidasi temuan penelitian.

Lokasi penelitian berada di Dusun 3 Desa Bakung, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya persoalan pencemaran lingkungan yang berasal dari aktivitas PT Cipta Mandala Lumber Nusantara, berupa debu hitam yang mengganggu kesehatan serta aktivitas masyarakat, terutama menyebabkan keluhan sesak napas dan gangguan lingkungan lainnya. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan alat tulis dan rekaman ponsel untuk mencatat informasi penting dari beberapa narasumber, seperti masyarakat Dusun 3, Kepala Desa Bakung, serta pihak perusahaan. Wawancara tersebut berfokus pada kebijakan terkait pencemaran udara, tuntutan masyarakat, serta pengalaman langsung warga terdampak. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi lapangan guna melihat sendiri kondisi pencemaran, seperti keberadaan debu hitam yang menjadi sumber permasalahan. Observasi ini memberikan gambaran nyata mengenai pelanggaran dan dampak lingkungan yang terjadi.



Dokumentasi juga dilakukan melalui pengumpulan foto, arsip, rekaman, berita, serta catatan yang berkaitan dengan pergerakan masyarakat Desa Bakung dalam menyuarakan keluhan mereka.

Proses analisis data dilakukan secara beriringan dengan tahap pengumpulan data, sebagaimana dijelaskan Creswell (2016). Setiap data yang diperoleh dicatat dalam bentuk catatan lapangan, kemudian diberikan kode agar sumbernya mudah ditelusuri. Setelah itu, data dihimpun, dipilah, dikelompokkan, dan diklasifikasikan sesuai kategori yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah terorganisasi kemudian disintesis menjadi ringkasan dan indeks untuk memudahkan peneliti dalam memahami keseluruhan temuan. Selanjutnya, peneliti menyusun kategori data yang bermakna, menemukan pola dan hubungan antar temuan, serta menarik kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah. Tahapan-tahapan tersebut mengacu pada proses analisis data kualitatif menurut Seiddel (1998), yang menekankan pentingnya proses berpikir kritis untuk menghasilkan temuan yang signifikan dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik dan Tantangan Pengelolaan Limbah Industri: Studi Kontekstual sebagai Dasar Evaluasi PT Cipta Mandala Lumber Nusantara

Industri pengolahan kayu seperti PT Cipta Mandala Lumber Nusantara menghasilkan limbah dalam jumlah signifikan sebagai konsekuensi langsung dari proses produksi. Limbah yang dihasilkan umumnya berupa serbuk gergaji, potongan kayu kecil, sisa pemotongan, hingga debu amplas. Jenis limbah ini tergolong limbah padat organik yang sebenarnya masih memiliki nilai guna dan dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku sekunder untuk industri lain seperti kerajinan, papan partikel, hingga bahan bakar biomassa.

Menurut Sutapa (2010), terdapat korelasi antara harga bahan baku yang semakin murah dengan jumlah limbah yang dihasilkan; semakin murah bahan baku, maka semakin banyak juga limbah yang muncul akibat penurunan kualitas atau efisiensi bahan tersebut. Selain itu, Ramadhanti dkk. (2019) menambahkan bahwa ketersediaan bahan baku yang melimpah juga berbanding lurus dengan kuantitas limbah yang dihasilkan, di mana faktor lain seperti kualitas tenaga kerja dan tingkat teknologi menjadi aspek penentu dalam jumlah dan pengelolaan limbah tersebut.

Limbah industri kayu dapat dikategorikan ke dalam dua jenis utama, yaitu limbah dari pengolahan kayu primer dan sekunder (ICIP, 2004). Limbah primer berasal dari kegiatan industri penggergajian dan produksi kayu lapis, sedangkan limbah sekunder muncul dari proses manufaktur lanjutan seperti pembuatan furnitur. Kayu lapis sendiri merupakan produk rekayasa yang dibuat dari penyusunan lembaran finis yang direkatkan secara bersilangan, dan dalam proses produksinya, hampir seluruh tahapan berpotensi menghasilkan limbah (Mintarsih, 2006).

Dalam konteks Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), limbah didefinisikan sebagai sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Definisi ini menekankan pentingnya tanggung jawab industri dalam mengelola limbah yang dihasilkan, bukan hanya dari sisi kuantitas tetapi juga dari sisi dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.

Muhdi (2006) mengklasifikasikan limbah kayu menjadi dua berdasarkan sumbernya: limbah pemanenan, sisa yang di tinggalkan di hutan setelah penebangan pohon (*logging waste*) yang terjadi di hutan akibat penebangan, dan limbah industri sisa hasil pemotongan setelah di tebang (*processing waste*) yang muncul dari proses di pabrik seperti penggergajian dan



produksi meubel. Dalam konteks PT Cipta Mandala Lumber Nusantara, mayoritas limbah termasuk dalam kategori processing waste, yang sering kali tidak dikelola secara optimal.

Tantangan utama dalam pengelolaan limbah industri kayu di perusahaan ini maupun industri sejenis adalah belum maksimalnya penerapan prinsip menghilangkan limbah dengan cara mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang atau *Zero Waste*. Konsep ini menuntut agar proses produksi dirancang sedemikian rupa agar tidak menghasilkan sampah sama sekali atau seminimal mungkin. Pendekatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) atau mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang dapat menjadi strategi utama, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan teknologi pengolahan, rendahnya kesadaran tenaga kerja, dan belum adanya sistem insentif untuk inovasi pengelolaan limbah.

Maka dari itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap sistem pengelolaan limbah di PT Cipta Mandala Lumber Nusantara guna menyusun kebijakan dan strategi berbasis data. Studi kontekstual seperti ini tidak hanya menjadi landasan evaluasi internal perusahaan, tetapi juga menjadi dasar bagi pengembangan model pengelolaan limbah yang berkelanjutan di sektor industri kayu nasional.

B. Upaya PT.Cipta Mandala Lumber Nusantara dalam mengelola limbah industri di Desa Bakung.

Penggunaan teknologi tradisional dalam industri pengolahan kayu hingga kini masih menjadi salah satu penyebab munculnya persoalan lingkungan, terutama karena pemakaian energi yang kurang efisien dan pengelolaan limbah yang belum optimal. Serbuk serta sisa pengolahan kayu yang tidak dikelola dengan baik berpotensi mencemari udara, tanah, dan air, sehingga menimbulkan risiko bagi ekosistem maupun kesehatan masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, limbah kayu seharusnya melalui proses pengolahan yang tepat agar dampak pencemaran dapat diminimalkan.

PT Cipta Mandala Lumber Nusantara, salah satu perusahaan pengolahan kayu yang beroperasi di Kecamatan Indralaya Utara, merupakan bagian dari industri primer hasil hutan tanaman yang menghasilkan berbagai jenis olahan kayu seperti kayu gergajian, kayu bulat, dan kayu lapis. Perkembangan industri kayu yang pesat di daerah ini ternyata berbanding lurus dengan meningkatnya tekanan lingkungan, terutama di Desa Bakung. Masyarakat setempat merasakan dampak sosial dan kesehatan akibat debu hitam dari proses produksi, yang memicu gangguan pernapasan serta menghambat aktivitas sehari-hari. Situasi ini juga memunculkan konflik sosial antara warga dan perusahaan karena masyarakat menilai bahwa pengelolaan limbah pada masa awal beroperasinya perusahaan belum dilakukan secara memadai.

Pencemaran yang berlangsung bertahun-tahun membuat masyarakat Desa Bakung mengajukan protes keras, hingga akhirnya melakukan aksi demonstrasi untuk mendesak pemerintah daerah dan perusahaan agar segera menangani persoalan tersebut. Konflik ini kemudian mendorong perusahaan, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya untuk melakukan langkah-langkah penanganan, termasuk pemasangan boiler, pemasangan sistem penyaring udara, peninggian cerobong, serta pemantauan kualitas udara secara berkala.

Dokumen resmi dari PBUI PT Cipta Mandala Lumber Nusantara menunjukkan bahwa perusahaan telah menyusun dan melaporkan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I dan II Tahun 2023 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir. Upaya pengelolaan limbah dilakukan melalui pemanfaatan limbah padat—seperti serbuk kayu, potongan kayu, dan sebetan—sebagai bahan bakar boiler, serta melalui pengelolaan



limbah cair yang dialirkan ke bak penampungan sebelum diproses di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Perusahaan juga bekerja sama dengan laboratorium lingkungan independen untuk mengukur kualitas udara, limbah cair, dan kebisingan. Hasil uji menunjukkan bahwa seluruh parameter berada di bawah ambang batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan pemerintah.

Selain itu, pemerintah desa bersama masyarakat dan perusahaan melakukan pemantauan lingkungan secara rutin. Langkah-langkah tambahan dilakukan sebagai bentuk mitigasi dampak, seperti pemasangan penyaring udara, penyemprotan air di jalan untuk mengurangi debu yang berterbangan, penanaman pohon di area sekitar pabrik dan pemukiman sebagai penahan debu alami, serta imbauan penggunaan masker pada musim kemarau.

Masyarakat Desa Bakung yang sebelumnya tidak pernah dilibatkan dalam proses pengelolaan limbah kini mulai memperoleh ruang untuk berpartisipasi. Setelah terjadinya demonstrasi, hubungan antara masyarakat dan perusahaan mulai diarahkan menuju proses dialog dan kolaborasi, terutama dalam pemantauan kualitas udara dan evaluasi sistem pengelolaan limbah. Meski demikian, pengalaman bertahun-tahun menghadapi pencemaran debu telah meninggalkan ketidakpercayaan yang cukup signifikan di kalangan warga.

Jika ditinjau menggunakan teori politik lingkungan Paterson (2000), dinamika antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah di Desa Bakung menunjukkan bagaimana persoalan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari relasi kekuasaan dan kepentingan ekonomi. Dominasi kepentingan industri dalam aktivitas produksi—tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan—telah menimbulkan ketegangan struktural antara perusahaan dan masyarakat yang terdampak langsung. Protes masyarakat menjadi bentuk resistensi politik terhadap ketidaksetaraan tersebut dan melahirkan ruang baru bagi warga untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan.

Dalam konteks ini, kasus PT Cipta Mandala Lumber Nusantara tidak hanya memperlihatkan persoalan teknis mengenai limbah industri, tetapi juga menunjukkan bagaimana isu lingkungan dapat berkembang menjadi persoalan sosial dan politik ketika masyarakat merasakan ketidakadilan ekologis. Kerja sama antara perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pengelolaan limbah dapat dilakukan secara transparan, adil, dan berkelanjutan demi mengurangi dampak negatif bagi lingkungan dan kehidupan warga Desa Bakung.

C. Respon masyarakat atas dampak limbah yang dihasilkan PT.Cipta Mandala Lumber Nusantara

Kehadiran industri besar seperti PT Cipta Mandala Lumber Nusantara di Desa Bakung, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, membawa dampak ganda bagi masyarakat sekitar. Di satu sisi, perusahaan ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas industri. Namun, di sisi lain, keberadaannya juga menimbulkan persoalan lingkungan yang cukup serius, terutama terkait limbah yang dihasilkan dari proses produksi kayu dan kayu lapis.

Beragam respon muncul dari masyarakat terhadap keberadaan perusahaan tersebut. Perbedaan sikap ini didasarkan pada tingkat dampak yang dirasakan masyarakat serta pemahaman mereka terhadap mekanisme produksi dan pengelolaan limbah industri. Di tahap awal beroperasinya perusahaan, kekhawatiran masyarakat cukup kuat, terutama bagi mereka yang tinggal berdekatan dengan area pabrik. Bau menyengat dari bahan kimia yang digunakan dalam proses pengolahan kayu, debu serbuk kayu yang terbawa angin hingga mencapai



permukiman, serta kebisingan dari mesin produksi menjadi gangguan yang mengurangi kenyamanan hidup sehari-hari.

Gangguan tersebut kemudian mulai dirasakan secara fisik oleh sebagian masyarakat berupa batuk berkepanjangan, iritasi mata, dan rasa sesak napas, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Situasi ini menimbulkan persepsi bahwa aktivitas produksi perusahaan telah mencemari lingkungan sekitar. Ketidakpastian mengenai sumber pasti dari gangguan tersebut semakin memperkuat anggapan masyarakat bahwa kegiatan industri merupakan penyebab utama, sehingga rasa cemas dan keresahan sosial pun meningkat.

Kondisi ini sempat memunculkan ketegangan antara warga dan pihak perusahaan karena masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses pengelolaan limbah maupun upaya pencegahan dampak lingkungan. Ketidakpuasan tersebut kemudian berkembang menjadi tuntutan kolektif agar perusahaan meningkatkan tanggung jawab lingkungan melalui pengelolaan limbah yang lebih baik dan transparansi dalam proses produksinya. Sebagai respon atas tekanan masyarakat dan tuntutan terhadap perbaikan kondisi lingkungan, perusahaan mulai melakukan upaya penanganan limbah melalui pemasangan boiler, penyaringan debu, dan peninggian cerobong pembuangan. Selain itu, dilakukan pula monitoring berkala terhadap kualitas udara di sekitar kawasan industri untuk memastikan bahwa aktivitas produksi tidak melampaui batas aman lingkungan.

Pemerintah desa bersama masyarakat juga turut melakukan evaluasi berkala terhadap kondisi lingkungan, termasuk mendorong tindakan preventif seperti penghijauan di sekitar area pabrik, penyiraman jalan untuk mengurangi debu, serta penggunaan masker pada musim kemarau. Upaya kolaboratif antara masyarakat, pemerintah lokal, dan perusahaan ini bertujuan untuk menekan dampak negatif lingkungan sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas industri di wilayah tersebut.

Melalui dinamika ini dapat dilihat bahwa persoalan limbah industri tidak hanya berdampak pada kondisi fisik lingkungan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga memunculkan dimensi sosial-politik yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat, transparansi perusahaan, dan kemampuan pemerintah lokal dalam mengelola konflik lingkungan. Situasi di Desa Bakung mencerminkan bagaimana hubungan antara industri dan masyarakat membutuhkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

a. Timbulnya Konflik Sosial dan Tuntutan Masyarakat

Seiring meningkatnya keluhan warga terkait dampak limbah, pihak desa—termasuk kepala desa dan kepala dusun—mulai mengambil peran sebagai mediator untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada perusahaan. Tuntutan yang disampaikan masyarakat pada saat itu bukan bersifat destruktif, tetapi lebih kepada permintaan agar perusahaan bertanggung jawab dan segera mengatasi gangguan lingkungan, terutama limbah debu yang mulai meresahkan.

Ketegangan mulai muncul ketika masyarakat menilai respon perusahaan lamban dan kurang transparan. Kondisi ini mendorong warga untuk melakukan berbagai bentuk aksi kolektif seperti musyawarah, unjuk rasa damai, hingga menyampaikan laporan kepada instansi pemerintah. Konflik sosial pun berkembang ketika sebagian warga merasa hak-haknya terabaikan, sementara sebagian lainnya khawatir akan hilangnya mata pencaharian jika hubungan dengan perusahaan memburuk.



Dulu, masyarakat pernah merasakan debu dan asap yang cukup mengganggu, terutama selama musim kemarau. Meskipun sumber asap tidak sepenuhnya berasal dari pabrik, masyarakat tetap meminta agar perusahaan bertanggung jawab dan mengatasi dampak debu tersebut. Beberapa warga juga pernah mengalami iritasi mata akibat paparan debu yang masuk ke pemukiman. Pemerintah desa kemudian melakukan pengecekan ke lokasi perusahaan untuk memastikan kondisi sebenarnya. Secara umum, tuntutan masyarakat pada waktu itu bukanlah bentuk penolakan terhadap kehadiran perusahaan, melainkan dorongan agar perusahaan memperhatikan kualitas lingkungan. Saat ini, masyarakat menilai gangguan debu sudah mulai berkurang, sehingga hubungan antara warga dan perusahaan menjadi lebih kondusif.

b. Upaya Perusahaan dan Perubahan Persepsi Masyarakat

Menanggapi kritik dan keluhan masyarakat, PT. Cipta Mandala Lumber Nusantara segera melakukan beberapa langkah strategis. Perusahaan membangun boiler untuk memanfaatkan limbah padat kayu sebagai bahan bakar dan membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengelola limbah cair. Selain itu, perusahaan bekerja sama dengan laboratorium independen untuk melakukan uji kualitas udara, air, dan tingkat kebisingan secara berkala. Perusahaan juga mulai melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pemantauan lingkungan. Warga diajak melihat proses pengolahan limbah, memahami fungsi cerobong asap, sistem penyaringan, dan prosedur penanganan jika terjadi kerusakan. Komunikasi antara perusahaan dan masyarakat dilakukan secara rutin, biasanya setiap satu hingga tiga bulan sekali.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat menyadari bahwa perusahaan menunjukkan komitmen untuk melakukan perbaikan. Warga yang awalnya ragu dan khawatir kini mulai lebih tenang karena dilibatkan langsung dalam pemantauan lingkungan dan dapat menyampaikan keluhan secara terbuka. Hubungan antara perusahaan dan masyarakat pun berjalan cukup kondusif, dengan perusahaan berusaha merespons setiap aduan secara cepat dan transparan.

c. Pandangan yang Beragam di Kalangan Masyarakat

Pandangan masyarakat Desa Bakung mengenai keberadaan pabrik tidak seragam. Sebagian warga merasakan manfaat signifikan, terutama dalam hal pembukaan lapangan pekerjaan yang mengurangi tingkat pengangguran. Bagi kelompok ini, keberadaan pabrik dianggap sebagai peluang ekonomi dan mereka merasa tidak terlalu terdampak oleh isu lingkungan. Namun, sebagian warga lainnya merasakan dampak negatif, terutama debu yang masuk ke dalam rumah saat musim kemarau. Mereka menilai gangguan ini secara langsung mempengaruhi kenyamanan hidup. Meskipun demikian, keluhan yang muncul tetap disampaikan secara konstruktif dan diarahkan pada upaya mencari solusi, bukan sebagai bentuk penolakan total terhadap perusahaan.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa pengalaman masyarakat terhadap dampak industri sangat dipengaruhi oleh kondisi tempat tinggal masing-masing. Mereka yang tinggal lebih dekat dengan lokasi pabrik cenderung lebih peka terhadap perubahan kualitas udara, sementara yang tinggal lebih jauh merasakan gangguan yang lebih minimal.

D. Kondisi Terkini: Kerja Sama dan Pengawasan Bersama

Saat ini, hubungan antara masyarakat, pemerintah desa, dan perusahaan menunjukkan perkembangan positif. Meskipun masih terdapat gangguan ringan seperti debu pada musim kemarau, upaya untuk menjalin komunikasi yang terbuka terus dilakukan. Warga juga



semakin aktif terlibat dalam kegiatan pemantauan lingkungan, termasuk mengikuti pengecekan saluran limbah dan mengamati proses pengolahan di pabrik.

Pemerintah desa secara rutin memfasilitasi pertemuan bulanan untuk membahas perkembangan serta menindaklanjuti keluhan masyarakat. Setiap masalah yang muncul langsung dikomunikasikan kepada perusahaan sehingga dapat diselesaikan tanpa menimbulkan konflik besar. Transparansi perusahaan dalam memberikan informasi dan kesediaannya melibatkan masyarakat menjadi faktor penting terciptanya hubungan yang harmonis. Keadaan ini menggambarkan adanya komitmen bersama antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah desa untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dan kelestarian lingkungan. Masalah yang masih tersisa dapat dikelola dengan baik berkat adanya komunikasi yang efektif, sehingga menciptakan suasana damai dan saling menghargai.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan limbah industri kayu di Desa Bakung tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan limbah, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan politik yang kuat. Pada tahap awal beroperasinya PT Cipta Mandala Lumber Nusantara, sistem pengelolaan limbah belum berjalan optimal sehingga memicu gangguan lingkungan berupa debu hitam, polusi udara, dan keluhan kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut melahirkan keresahan sosial, memunculkan ketegangan antara warga dan perusahaan, serta mendorong terbentuknya aksi kolektif berupa unjuk rasa, aduan formal, dan musyawarah dengan pemerintah desa. Respons masyarakat yang semakin kuat memaksa perusahaan dan pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh. PT CMLN kemudian mengambil langkah perbaikan, seperti pemasangan boiler, peninggian cerobong, pemasangan penyaring udara, pemantauan kualitas lingkungan, serta pemanfaatan limbah padat sebagai bahan bakar. Upaya ini disertai peningkatan transparansi melalui pelibatan masyarakat dan pemantauan bersama, sehingga secara bertahap mengurangi ketidakpercayaan yang sempat tumbuh di tengah warga.

Secara politik, kasus ini memperlihatkan bagaimana isu lingkungan dapat berkembang menjadi arena perebutan kepentingan antara masyarakat, pemerintah desa, perusahaan, dan instansi pengawas lingkungan. Konflik ini juga memperkuat pemahaman bahwa keadilan ekologis hanya dapat dicapai melalui hubungan yang seimbang antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan limbah industri membutuhkan kolaborasi berkelanjutan, mekanisme pengawasan yang jelas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan limbah yang baik bukan hanya soal kepatuhan teknis, tetapi juga mengenai bagaimana industri membangun akuntabilitas dan kepercayaan publik demi keberlanjutan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Adellia Mega Pratiwi, Wara Mustika Pudyaning Ratri, Muhammad Fiqih Samudera. (2023). *Analisis Dampak Pencemaran Limbah Industri PT.S Terhadap Kehidupan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Volume 1, No 4 (359-368).*
- Asmitha Anggraini, Ismail Rachman, Stefanus Sampe.(2021). *Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Industri PT Delta Pasifik Indotuna di Kelurahan Girian Bawah Kota Bitung. GOVERNANCE 1 (2)*



- Ima Maghfiro, M. Saleh Soeaidy, M.Rozikin. (2013). *Analisis Peran Pemerintah dalam mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula tjoekir (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang .Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya 1(3), 94-102*
- Rosseto,WibbyRoza. (2013) *Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Industri Penyamakan Kulit (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Magetan). Universitas Brawijaya.*
- Riskah Amaliyah Citra. (2018). *Strategi Pemerintah daerah dalam penanganan Limbah Industri. (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan).Universitas Brawijaya.*
- Mahdi, Nurawalliah.(2015). *Politik Pengelolaan Lingkungan Hidup diKabupaten Pangkep.(Implementasi Corporate Social Responsibility PT Semen Tonasa). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*
- Muhdi. (2006). *Limbah Pemanenan Kayu. Karya Tulis Departemen Kehutanan. Universitas Sumatera Utara. Medan*
- Sofyan , Ahmad (2023).*Pemanfaatan limbah kayu dengan menggunakan metode green productivity. Universitas Medan Area*
- Sutapa. (2010). *Konsep daur ulang dan penerapannya dalam pemanfaatan kayu sebagai bahan baku prosiding Seminar Nasional Masyarakat Penelitian Kayu Indonesia (MAPEKI) XIII Inna Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Bali 10-11 November 2010.*

Buku

- Bogdan , Robert C. & Sari Knopp Biklen. *Qualitative Research for Education : An. Introduction to Theory and Methods Boston : Allyn and bacon, Inc, 1982*
- Herman, Hidayat.(2011). *Politik Lingkungan : Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*
- J.Moleong, Ma.Prof.Dr.Lexy.(2017).*Metodologi Penelitian Kualitatif.*
- Internet
- Asosiasi Panel Kayu Indonesia. <https://apkindo.org/anggota/daftar-anggota> . Di akses pada 2 maret 2025.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/>. Di akses Pada 2 maret 2025
- Bada Pusat Statistik Ogan Ilir. <https://oganilirkab.bps.go.id/id/>. Di akses Pada 2 maret 2025
- Good Corporate Governance: Manfaat, Tantangan dan Contoh. Di akses pada 22 april 2025